

Prostitusi di Indonesia: Sebuah Analisis Kasus di Jawa

Koentjoro

Prostitusi adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat, dan nilai kaum wanita. Masalah ini dapat disejajarkan dengan perbudakan (Barry, 1979; Bullough, 1988), dan keberadaannya pun bertentangan dengan Pancasila (Departemen Sosial RI, 1984). Oleh karena itu "seharusnya" segala bentuk prostitusi tidak akan dijumpai di Indonesia. Namun demikian kenyataan yang sebaliknya malah yang ada.

Mengatasi masalah prostitusi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesamaan pendapat yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di negara-negara liberal barat masih ada pandangan-pandangan yang pro dan kontra tentang prostitusi. Bahkan, di antara kaum feminis pun masih terjadi perdebatan seru mengenai masalah ini (Carpenter, 1994; Jolin, 1994).

Di Indonesia prostitusi harus diberantas. Tetapi sementara itu arus informasi yang masuk ke Indonesia semakin terbuka, sehingga wajar jika pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan Pancasila akan ikut mempengaruhi sikap dan pandangan orang Indonesia, termasuk para pengambil keputusan, tentang prostitusi. Mungkinkah suatu hari nanti seorang wanita tuna susila dihargai sama dan sejajar dengan orang-orang dengan pekerjaan seperti sekretaris dan dosen?

Pandangan Kaum Feminis dan Efeknya terhadap Pandangan dan Praktek Prostitusi di Indonesia

Perdebatan di antara kaum feminis tentang prostitusi ternyata semakin hari semakin rumit. Namun demikian, inti perdebatan ini sebenarnya terletak pada pandangan kriminalisasi dan dekriminialisasi terhadap prostitusi (Davis, 1993; Carpenter, 1994). Namun anehnya, di antara kaum feminis sendiri mempunyai kesamaan pandangan dan menggunakan masalah prostitusi ini sebagai tumpuan untuk menentang adanya penindasan dan kesewenang-wenangan kepada kaum wanita pada masyarakat yang bersistem patriarkhat (Carpenter, 1994).

Dari dua kutub pandangan terhadap prostitusi ini, alasan utama yang dikemukakan oleh kelompok berpandangan kriminalisasi adalah masalah perbudakan wanita, dominasi pria, dan eksploitasi seksual (Davis, 1993; Carpenter, 1994; dan Jolin, 1994). Bahkan

Rowbotham (Truong, 1990; Davis, 1993) melihat prostitusi sebagai hegemoni kultural pria terhadap wanita.

Sebaliknya adalah pandangan kelompok dekriminialisasi, yaitu setuju terhadap praktek prostitusi dan menganggap prostitusi bukan tindak kriminal. Menurut Corbin (1990) kelompok ini mencari pembenaran lewat sejarah dan hak asasi. Pada jaman dahulu, agama dan masyarakat menganggap dosa onani dan masturbasi. Namun demikian, dengan berjalannya waktu anggapan semacam itu memudar sehingga orang tidak lagi dianggap berdosa melakukan onani dan masturbasi. Perkembangan berikutnya adalah mulai diterimanya praktek keluarga berencana yang menggunakan alat-alat pelindung untuk mencegah bertemunya sperma dan sel telur. Dengan alat-alat ini pemuasan kebutuhan seks dapat dilakukan tanpa perlu mencemaskan akan terjadinya kelahiran. Setelah itu, perkembangan selanjutnya adalah mulai diterimanya homoseksualisme dan lesbianisme sebagai perilaku yang “normal.”

Ada apakah sebenarnya di balik semua ini? Jawabnya adalah pengakuan terhadap hak untuk menyalurkan dan memuaskan hasrat seksual. Dengan diterimanya perubahan-perubahan di atas berarti pemanfaatan tubuh untuk kepentingan sosial guna menyalurkan dan memuaskan hasrat seksual pun bukan suatu masalah. Apabila teori ini benar, maka yang menjadi pikiran kita adalah apakah semua hal yang terjadi dengan pembenaran prostitusi seperti ini sebenarnya adalah hasil dari sebuah *social engineering* tingkat tinggi? Tampaknya pandangan dekriminialisasi ini lebih kuat pengaruhnya terhadap kelangsungan prostitusi.

Napoleon Bonaparte (Bullough dan Bullough, 1987) melihat adanya fungsi kontrol sosial pada prostitusi dan menyatakan bahwa prostitusi itu dibutuhkan masyarakat karena tanpa prostitusi diduga akan banyak pria yang merusak kehormatan wanita di jalanan. Coleman dan Cressey (1987) menekankan adanya banyak aspek positif dari prostitusi dan setuju dengan pendapat Napoleon tersebut. Namun demikian, praktek prostitusi harus tetap dikontrol karena prostitusi “mengundang kaum pria yang tidak tertarik terhadap pelayanan itu; menyerbu ke daerah-daerah yang tidak mau menerimanya, menyebabkan penularan penyakit-penyakit kelamin, dan dapat meningkatkan jumlah pengangguran.” Menutup lokalisasi atau rumah-rumah bordil cenderung akan meningkatkan jumlah wanita tuna susila di jalanan dan justru akan menambah kerumitan masalah.

Masih berkaitan dengan perkembangan kecenderungan di masyarakat terutama di Indonesia, jika sebelumnya membicarakan masalah seksual adalah tabu maka sekarang

ini pembicaraan semacam ini sudah mulai terbuka. Hal ini didukung oleh fasilitas-fasilitas teknologi seperti internet, parabola, telepon, dan satelit. Akibatnya, toleransi terhadap perilaku seksual juga semakin longgar. Oleh karena itu adalah mungkin jika rasionalisasi kelompok pro prostitusi tersebut di atas yang sebelumnya belum pernah diketahui di Indonesia kini akan merasuki cara berpikir bangsa Indonesia dalam memandang dan memecahkan masalah prostitusi. Perubahan persepsi ini pun akan menimbulkan masalah baru bagi sistem nilai, perkembangan moral dan susila, dan penerapan asas-asas Pancasila.

Karena kecenderungan yang terjadi di atas, sudah sepantasnyalah jika masalah prostitusi, tatanilai, moralitas, dan kesusilaan bangsa Indonesia perlu kita pikirkan bersama.

Prostitusi di Indonesia

Prostitusi bukan saja berkaitan dengan masalah kualitas moral pelakunya. Secara medik prostitusi akan menyebabkan penyakit kelamin seperti siphillis dan yang lebih mengerikan lagi HIV/AIDS. Ibu-ibu yang tertular penyakit ini dapat melahirkan anak-anak yang berkelainan fisik, sehingga prostitusi dapat menimbulkan masalah dalam kualitas generasi yang akan datang. Khususnya tentang penyebaran HIV/AIDS, Linnan (Mboi, 1994) menyatakan bahwa apabila kasus HIV/AIDS di Indonesia mulai digarap sejak tahun 1990, maka dalam prediksinya penderita HIV di Indonesia sampai tahun 2000 akan berjumlah antara satu setengah juta sampai tiga juta orang. Hal ini berarti di tahun 2000 nanti bangsa Indonesia akan menghadapi masalah dan tantangan yang sangat serius.

Mengingat seriusnya permasalahan yang dibawa oleh prostitusi, maka perlulah kiranya pemerintah mencari cara-cara yang efektif untuk memberantas prostitusi ini. Untuk sampai pada keputusan bentuk intervensi yang tepat kiranya perlu pula dipahami masalah prostitusi di Indonesia itu sendiri.

Prostitusi di Indonesia, sebagaimana di negara-negara seperti Thailand, Philipina, India, Bangladesh, dan Jepang, menyangkut masalah penghidupan. Penghidupan ini bukan saja bagi wanita tuna susila itu sendiri, mucikari, personal keamanan, dan tukang parkir saja (Jones dkk., 1995), melainkan juga bagi anak-anak, keluarga, dan sanak keluarganya (Murray, 1991; Davis, 1993). Akibatnya, masalah prostitusi menjadi semakin rumit. Murray (1991) menemukan bahwa seorang wanita tuna susila dapat membantu hingga 18 sanak familinya. Oleh karena itu tidaklah aneh apabila banyak dijumpai daerah-

daerah yang dikenal sebagai penghasil wanita tuna susila seperti yang tersebar di banyak daerah di Pulau Jawa (Koentjoro, 1988, 1989), sebagian Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Penemuan ini menunjukkan bahwa seorang wanita tuna susila kemudian menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya, yang mencakup keluarga dekat dan juga keluarga besarnya. Mengapa hal seperti ini terjadi?

Dari 12 tahun mengamati beberapa lokalisasi wanita tuna susila, penulis menemukan bahwa pada umumnya wanita tuna susila yang bekerja di lokalisasi dan resosialisasi berasal dari daerah-daerah tertentu, yang disebut sebagai “penghasil” wanita tuna susila. Daerah “penghasil” tersebut tersebar di beberapa daerah di Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Jones dkk. (1995) menyebutkan daerah pemasok wanita tuna susila antara lain adalah tujuh di antara 19 kecamatan di Indramayu. Ternyata, menurut Murray (1991), mempunyai reputasi sebagai pemasok wanita tuna susila juga membuat kebanggaan tersendiri bagi beberapa daerah di Jawa Barat.

Mengapa daerah-daerah tersebut kemudian berkembang menjadi daerah “penghasil”? Banyak hal yang diduga menjadi penyebabnya. Modeling, aspirasi material, sikap terhadap perkawinan, dan sikap permisif lingkungan (Koentjoro, 1994), dan motif sosial (Koentjoro, 1988, 1989) adalah faktor-faktor yang berpengaruh kuat dalam pembentukan seorang wanita menjadi wanita tuna susila.

a. Aspirasi Material Orangtua

Kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga yang rendah banyak dituding sebagai faktor yang mendasari keputusan seseorang untuk terjun ke prostitusi. Secara makro, alasan ini mungkin ada benarnya. Namun secara mikro kemiskinan ternyata bukan alasan pokok. Koentjoro (1988) menemukan bahwa kemiskinan bukanlah faktor utama yang mendorong seseorang untuk melacur. Banyak daerah yang jauh lebih miskin dari daerah “penghasil” wanita tuna susila namun tidak menghasilkan wanita tuna susila. Bahkan di daerah miskin “penghasil” wanita tuna susila banyak warga yang jauh lebih miskin dari para wanita tuna susila tetapi mereka tidak melacur. Ditemukan pula banyak wanita tuna susila yang secara ekonomi telah sukses tetap saja melacur (Koentjoro, 1989). Oleh karena itu Murray (1991) mengatakan bahwa melacur adalah perbuatan yang didasarkan pada pilihan rasional daripada perbudakan atau patologi. Tetapi mengapa orang memilih menjadi wanita tuna susila jika masalah kemiskinan bukan

penyebabnya?

Di beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada semacam pameo yang mengatakan bahwa anak perempuan dapat diibaratkan sepetak sawah (Koentjoro, 1988). Semakin cantik seorang anak itu akan semakin luas sawah yang dimiliki keluarganya. Sementara itu di daerah “penghasil” di Mojo Tengah (bukan nama sebenarnya) dikenal anak perempuan diistilahkan sebagai *dhuwit gedhe*, yang kira-kira berarti aset yang menghasilkan uang bagi keluarga.

Pameo anak perempuan ibarat sawah dan pengistilahan anak perempuan sebagai *dhuwit gedhe* adalah indikasi tingginya nilai material anak perempuan bagi orangtua, yang berarti pula tingginya aspirasi material orangtua dan masyarakat di daerah “penghasil” ini. Tantangan susahny mencari pekerjaan dan penghidupan membuat orangtua menjadi malas berpikir dan berusaha, dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan mengawinkan anak perempuannya pada usia yang masih sangat muda. Karena anak-anak ini belum siap kawin, akibatnya perceraian akan terjadi. Janda-janda muda ini kemudian menjadi “bibit-bibit” yang menjadi sasaran utama jaringan yang mencari calon wanita tuna susila. Kemudahan mendapat uang ini juga dinikmati oleh pemasok calon wanita tuna susila, karena mereka mendapat upah antara 500 ribu hingga dua juta rupiah per calonnya.

Dari uraian di atas tampak bahwa masalah pokoknya bukan kemiskinan, melainkan kekurangan berusaha sementara aspirasi material masyarakat cukup tinggi.

b. Modeling

Seorang yang berhasil karena menjadi wanita tuna susila dengan sendirinya akan menjadi model bagi masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan ini dapat berupa keberhasilan mengumpulkan uang dan ditunjukkan melalui pembangunan rumah dan pemilikan perabot yang luks, dapat pula berupa keberhasilan karena “dikawin” oleh orang terpandang. Di Mojo Tengah misalnya, ada seorang WTS yang “dikawin” seorang pengusaha nasional. Keluarga ini menyumbang 15 juta rupiah untuk pembangunan sebuah masjid yang cukup megah di desa itu. Akibatnya dermawan ini kemudian dijadikan model bagi masyarakat di sana, dijadikan dasar *kekudangan* para orangtua di sana bagi anak-anak perempuan mereka.

c. Sikap terhadap Perkawinan

Kecenderungan orangtua mengawinkan anak perempuannya di usia muda, berkembangnya pergundikan dan kumpul kebo, sudah menggambarkan bagaimana sikap masyarakat terhadap perkawinan. Dari pengamatan penulis tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa perjodohan (*arranged marriage*) adalah satu langkah sebelum seorang wanita terjun ke prostitusi.

Jones dkk. (1995) yang menemukan bahwa di daerah “penghasil” di Indramayu 44 dari 50 perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sakral dan harus dipertahankan kelangsungannya. Bahkan, di Indramayu dan beberapa daerah di Jawa Barat terdapat semacam nilai bahwa semakin sering seorang wanita kawin-cerai, semakin tinggi status sosial wanita janda itu. Dengan status yang tinggi ini janda tersebut akan semakin “mahal” harganya. Oleh karena itu tidaklah aneh jika Murray (1991) menemukan apabila wanita seperti ini dapat menghidupi hingga 18 sanak keluarganya.

d. Sikap Permisif Lingkungan

Tumbuh kembangnya wanita tuna susila di daerah “penghasil”nya, ternyata memberikan banyak “keuntungan” pada banyak pihak. Di daerah “penghasil,” para wanita tuna susila adalah dermawan yang banyak memberikan sumbangan bagi berbagai kegiatan, pembangunan dan kemajuan desanya. Mereka paling sering dimintai bantuan uang apabila ada peristiwa-peristiwa penting di desanya. Hal ini diakui oleh satu kepala desa di Mojo Tengah, bahkan kepala desa itu pernah memperingatkan pemuka masyarakat di desanya untuk tidak selalu meminta bantuan mereka, namun yang lebih penting adalah membinanya. Seorang Kepala Desa di suatu desa di Mojo Tengah itu menyatakan bahwa pada saat lebaran sering ada wanita tuna susila yang berhasil, yang jika pulang kampung membawa satu minibus berisi kain, sarung, dan pakaian untuk dibagi-bagikan pada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Kondisi yang “menguntungkan” seperti ini ternyata cenderung “dipertahankan” dan sebagai akibatnya sikap masyarakat menjadi semakin permisif terhadap prostitusi.

Pembudayaan prostitusi di daerah “penghasil” juga terjadi dengan munculnya “hikayat-hikayat” seperti misalnya kisah Ki Asem Bagus di Indramayu, kisah Kyai Braja

Sekti di Pati, kisah Pangeran Samodro di Gunung Kemukus. Selain itu, juga ada kepercayaan-kepercayaan lain misalnya sendang Kalinyamat di Jepara dipercaya sebagai tempat *ngenomke*, atau membuat muda dengan cara *kungkum* (berendam) telanjang bulat di air pada hari-hari tertentu. Bahkan sejak sekitar tahun 1992, beberapa makam di Yogyakarta (misalnya makam Mangleng, dekat makam Ki Hadjar Dewantara) setiap malam Jum'at Kliwon dan Selasa Kliwon dijadikan tempat transaksi seksual secara terselubung untuk wanita tuna susila kelas bawah yang di antaranya datang dari Klaten.

Selain hal-hal di atas, sejarah juga mempunyai peran dalam pembentukan sikap permisif masyarakat terhadap prostitusi. Jones dkk. (1995) mengatakan bahwa dasar-dasar terjadinya prostitusi di Indramayu berkaitan erat dengan "tradisi" Kasultanan di Cirebon. Hal ini juga mirip dengan kasus di Wonogiri dengan Kasunanan di Surakarta. Dengan keadaan ini, tidaklah aneh jika pergundikan dan kumpul kebo biasa dijumpai di daerah-daerah "penghasil" ini. Karena sudah asing lagi, di daerah tertentu di Mojo Tengah istilah pergundikan mereka kenal sebagai "perkawinan mut'a" atau kawin kontrak yang banyak terjadi sebelum jaman Nabi Muhammad SAW.

Satu hal yang menarik dari temuan Tim Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Tempo, 28 Agustus 1993) patut dikemukakan di sini. Tim ini menemukan bahwa ada di antara wanita tuna susila yang melacur dengan ijin suami, dan diantar orangtuanya. Hal ini senada dengan yang ditemukan penulis baru-baru ini di Mojo Tengah. Banyak suami yang tinggal di desa menunggui anak dan rumah yang sudah diisi perabot mewah hasil "kerja" isteri sementara itu sang isteri melacur di kota. Fenomena ini semakin menunjukkan bahwa prostitusi tidak lagi dianggap sebagai masalah yang serius dan prostitusi sudah dianggap sebagai sejenis pekerjaan.

e. Motif Sosial

Sebagaimana telah disebutkan di atas, masyarakat di daerah "penghasil" wanita tuna susila mempunyai aspirasi material tinggi (Koentjoro, 1988, 1989). Sementara itu aspirasi mempunyai hubungan yang kuat dengan harga diri. Oleh karena itu diduga harga diri masyarakat itu pun akan setara dengan tingginya aspirasi material itu. Karena harga diri dan status sosial juga terkait erat, akibatnya masalah materialisme dan modeling mempunyai kaitan erat pula dengan status sosial seseorang di masyarakatnya. Hal ini tampak nyata di daerah "penghasil". Di Mojo Tengah, misalnya, meski aliran listrik

belum ada, seorang wanita tuna susila yang sukses telah memajang antena parabola di rumahnya yang sangat khas dan berbeda dari bentuk rumah di sekitarnya (umumnya bergaya “Spanyolan”).

Orang yang menjunjung tinggi status sosial akan didominasi motif berkuasa (McClelland, 1985), sementara menurut penelitian Martaniah (1984) ditemukan bahwa umumnya masyarakat pedesaan Indonesia didominasi oleh motif berafiliasi. Karena dorongan untuk melacur bukan hanya berasal dari wanita tuna susila sendiri, namun juga dari suami ataupun orangtua, maka dapat dikatakan bahwa paling tidak salah satu pendorong ini didominasi oleh motif berkuasa.

Dari uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wanita tuna susila berasal dari daerah-daerah tertentu yang dapat disebut sebagai “penghasil.” Daerah-daerah tertentu tersebut rata-rata mempunyai ciri-ciri yang sama yaitu masyarakatnya mempunyai aspirasi material yang tinggi sehingga menggunakan orang-orang yang berhasil, dalam hal ini wanita tuna susila, sebagai model mereka; kurang menganggap penting lembaga perkawinan; permisif terhadap prostitusi, dan penentu dalam mengambil keputusan untuk terjun dalam prostitusi mempunyai motif sosial berkuasa.

Jenis dan Pembinaan Wanita Tuna Susila di Indonesia

Jenis wanita tuna susila di Indonesia sangat bervariasi. Mereka dapat ditemukan dari yang terselubung (misalnya sebagai *lobbyer*) hingga yang terang-terangan, dari yang berpraktek di hari-hari tertentu di kuburan hingga yang berpraktek tiap hari di hotel, dan dari yang dapat dipilih secara langsung sampai yang hanya lewat foto.

Berdasarkan tempat kerja wanita tuna susila, secara garis besar dapat dipisahkan menjadi dua yaitu yang praktek di resosialisasi (Resos) dan berpraktek di luar resosialisasi. Mereka yang ada di Resos seakan-akan mempunyai status sebagai wanita tuna susila yang “diakui” sedangkan yang berpraktek di luar resosialisasi dicap sebagai wanita tuna susila *illegal*.

Apakah sebenarnya yang disebut resosialisasi? dan apakah perbedaan antara resosialisasi dan lokalisasi? Sebenarnya lokalisasi prostitusi di Indonesia tidak ada, yang ada adalah resosialisasi. Mengapa demikian? Lokalisasi berarti mengumpulkan tempat praktek prostitusi dan seluruh dampak negatifnya ke dalam suatu tempat yang jauh dari tempat hunian masyarakat. Apabila hal ini yang terjadi artinya pemerintah melegalkan praktek perdagangan wanita, walaupun kenyataannya tidaklah demikian. Pemerintah

Indonesia menentang adanya praktek perdagangan wanita. Oleh karena itu istilah lokalisasi tidak lagi digunakan. Resosialisasi didirikan dengan asumsi bahwa wanita tuna susila adalah penyandang penyakit atau masalah sosial sehingga memerlukan intervensi pemerintah untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Oleh karena itu seharusnya resosialisasi ini berisi suatu program pendidikan untuk mengembalikan wanita tuna susila ke masyarakat. Perlu diketahui bahwa pada kenyataannya pada sistem resosialisasi ini wanita tuna susila masih berpraktek dengan menggunakan bangunan yang telah ditujukan untuk itu oleh pemerintah. Karena pembinaan resosialisasi ini di bawah koordinasi Pemerintah Daerah Tingkat II dalam hal ini Dinas Sosial Kotamadya atau Kabupaten, maka upaya pembinaannya pun sangat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Sebagai akibatnya, upaya resosialisasi itu menjadi tidak baku dan variasinya bergerak dari sekadar menyediakan gubug praktek bagi para wanita tuna susila hingga pembinaan resosialisasi. Sayangnya, pembinaan yang dilakukan dinas sosial kabupaten/kotamadya yang telah menerapkan sistem pembinaan resosialisasi ini pun masih kurang berhasil. Kekurangberhasilan sistem resosialisasi ini kemudian menyebabkan batasan antara resosialisasi dan lokalisasi kemudian menjadi rancu. Lebih parah lagi, penggunaan istilah resosialisasi dan lokalisasi sering saling dipertukarkan atau digunakan bersama-sama dalam pernyataan-pernyataan dan pemberitaan-pemberitaan karena banyak petugas, pejabat dan wartawan yang tidak mengetahui permasalahan ini. Akibatnya, arti resosialisasi itu sendiri kemudian menjadi kabur dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Wanita tuna susila yang menjadi penghuni resosialisasi ternyata mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Mereka mendapat pendidikan, pemeriksaan kesehatan secara rutin, tempat tinggal dan tempat praktek, keamanan, dan bentuk-bentuk lain pembinaan (Yuniatmi, 1986; Koentjoro, 1991). Wanita tuna susila jenis ini bebas dari razia, sekalipun dia di "pesan" untuk "main" di luar kompleks. Kondisi inilah yang membuat wanita tuna susila "*legal*" menjadi "betah" tinggal di resos. Resos ternyata lebih memberikan rasa aman. Situasi kebersamaan membuat adanya perasaan bahwa ada orang lain yang mempunyai nasib yang sama dengannya, dan ini membuatnya merasa "aman." Perlu diketahui bahwa pada umumnya wanita tuna susila selalu dikungkung oleh konflik. Baik itu konflik kepentingan yaitu antara rasa butuh uang dan rasa berdosa, juga adanya perasaan bahwa semua orang tahu bahwa dia adalah wanita lacur, sehingga ada perasaan tidak aman apabila berada di luar kompleks resosialisasi.

Program resosialisasi adalah untuk mengentaskan wanita tuna susila untuk menjadi anggota masyarakat biasa. Namun demikian, upaya resos ini tidak jelas hasilnya. Oleh

karena itu meskipun Resos adalah andalan pemerintah dalam membina wanita tuna susila (Departemen Sosial RI, 1984), di tingkat DPRD resos masih menjadi materi perdebatan yang seru antar fraksi. Pemda Klaten, misalnya, melihat resos tidak memberikan hasil apa-apa. Oleh karena itu resos “mBaben” yang didirikan pada tahun 1958 ditutup pada tahun 1992. Ketidakberhasilan resos ini juga tampak dari laporan Departemen Sosial RI dalam “Buku Putih: Rehabilitasi Sosial Tuna Susila 1994”. Di situ dijelaskan bahwa jumlah wanita tuna susila yang terdaftar di resos seluruh Indonesia pada tahun 1990/1991 adalah 49.619 orang, namun demikian pada tahun 1994/1995 justru bertambah menjadi 71.281 orang (Jones dkk. 1995).

Pengawasan prostitusi juga diupayakan dari segi hukum. Namun demikian, perlakuan hukum pada wanita tuna susila di Indonesia pun tidak jelas. Hukum lebih menekankan pada praktek mucikari dan perzinahan. Oleh karena itu dalih yang digunakan untuk merazia wanita tuna susila adalah tidak membawa Identitas Diri khususnya KTP. Ketidakjelasan itu tampak dari kasus razia di Bantul yang menghukum 30 hari pada wanita tuna susila kelas “pasar,” sementara pada waktu yang sama wanita tuna susila kelas menengah di Kodya Yogyakarta hanya dikenai denda Rp. 7.500,- dan mereka kemudian terus praktek lagi.

Dari uraian di atas tampak bahwa upaya-upaya pengentasan wanita tuna susila belum efektif. Masih banyak faktor-faktor penyebab yang belum tersentuh oleh upaya-upaya ini, sehingga wajar jika satu atau dua wanita tuna susila meninggalkan profesinya, puluhan orang pendatang baru mengisi tempatnya.

Mengingat bahwa praktek prostitusi bertentangan dengan Pancasila, dan pada kenyataannya praktek prostitusi sangat sulit diberantas, maka perlu diupayakan langkah-langkah kongkrit yang merujuk pada kombinasi dua hal ini. Oleh karena itu di samping langkah yang berupa pencegahan berkembangnya jumlah wanita tuna susila, pembatasan gerak lewat upaya resosialisasi perlu diteruskan.

Upaya pencegahan berkembangnya jumlah wanita tuna susila sebaiknya dikonsentrasikan pada daerah-daerah “penghasilnya.” Dengan memperhatikan faktor-faktor antropologik, sosiologik, dan psikologi sosial dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip kerja pekerja sosial, maka bukan hanya jumlah wanita tuna susila yang ditekan melainkan desanya juga terbina secara intensif. Adanya proyek pembinaan di pedesaan yang intensif ini dengan sendirinya juga akan memungkinkan terjadinya peningkatan kesadaran pembangunan di daerah pedesaan, yang hal ini berarti peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan saran Greenwald (1970)

bahwa pengentasan perlu memperhatikan sub-kultur yang dihayati daerah di mana wanita tuna susila dibentuk.

Dampak lain dengan upaya konsentrasi ini adalah akan hilangnya label “penghasil” wanita tuna susila pada daerah-daerah tertentu. Apabila upaya ini berhasil, akibatnya adalah akan terjadi peningkatan harga diri masyarakat yang tinggal dan berasal dari daerah itu. Peningkatan harga diri akan memunculkan rasa memiliki daerah itu, sehingga masyarakat lebih berusaha memajukan daerahnya dan produktivitas kerja masyarakat pun meningkat.

Menjangkitnya penyakit HIV/AIDS dengan sendirinya akan menimbulkan momok bagi wanita tuna susila maupun suaminya yang tinggal di desa. Suami tidak lagi merasa aman untuk menggauli isterinya, manakala si isteri pulang kampung. Dengan tergarapnya daerah “penghasil” ini dengan sendirinya akan mempunyai dampak pada rasa aman bagi suami dan tercegahnya penyakit kelamin, HIV/AIDS di daerah pedesaan di Indonesia.

Langkah ke dua yang disarankan untuk membatasi jumlah wanita tuna susila dan membatasi efek negatif dari praktek prostitusi adalah adanya lokalisasi atau resosialisasi bagi para wanita tuna susila. Saran ini bukan merupakan hal yang baru, karena sebenarnya upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah. Namun sayangnya keberhasilan intervensi pemerintah dengan sistem resosialisasi ini masih kurang. Kekurangberhasilan pembinaan ini perlu diteliti secara seksama, kemudian diambil langkah-langkah kongkrit sehingga dapat dibuat suatu model pembinaan resosialisasi/lokalisasi yang dapat diaplikasikan sesuai dengan tempat, sifat, dan keadaannya. Model itu hendaknya bukan saja untuk wanita tuna susilanya, namun juga untuk para mucikari, dan para petugas yang berkecimpung dalam dunia prostitusi termasuk Satpamnya sekalipun. Integritas dan kedisiplinan para petugas tampaknya akan sangat berpengaruh pada keberhasilan proyek ini.

Kepustakaan

Barry, K. 1979. *Female Sexual Slavery*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Bullough, B. 1988. *The Subordinated Sex: A History of Attitudes toward Women*. Athens: The University of Gorgia Press.

- Bullough, V. dan Bullough, B. 1987. *Women and Prostitution: A Social History*. New York: Prometheus Books.
- Carpenter, B. 1994. The Dilemma of Prostitution for Feminists. *Social Alternatives*. Vol. 12. No. 4: 25-28.
- Coleman, J.W., and Cressey, D.R. 1987. *Social Problems*. New York: Harper and Row Publishers.
- Davis, N.J. 1993. *Prostitution: An International Handbook on Trends, Problems, and Policies*. Westport: Greenwood Press.
- Departemen Sosial RI. 1984. *Keputusan Menteri Sosial RI NO, 07/HUK/KEP/III/1984 tentang: Rancangan Dasar Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Citra Yudha Karya.
- Greenwald, H. 1970. *The Elegant Prostitute: A Social and Psychoanalytic Study*. New York: Walker and Company.
- Jolin, A. 1994. On the Backs of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitution Policy. *Crime & Delinquency*. Vol. 40. No. 1: 69-83. January 1994.
- Jones, G.W., Sulistyaningsih, E., and Hull, T.H.. 1995. *Prostitution in Indonesia. Working Paper in Demography*. Unpublished. Canberra: ANU.
- Koentjoro. 1988. Perbedaan Aspirasi dan Nilai Anak di Daerah Miskin Penghasil Pelacur dan Bukan Penghasil Pelacur di Jawa Tengah dan DIY. *Laporan Penelitian*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: The Toyota Foundation.
- _____. 1989. Perbedaan Harga Diri Remaja di Daerah Miskin Penghasil Pelacur dan Bukan Penghasil Pelacur. *Laporan Penelitian*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- _____. 1994. The Link Between Prostitution and Family Life in Areas which "Produce" Prostitutes in Rural of Indonesia. *Seminar Paper*, presented on the International Social Work Seminar, La Trobe University, Bundoora, Victoria, Australia, 1 August 1994.
- Martaniah, S.M. 1984. *Motif Sosial Remaja Suku Jawa dan Keturunan Cina di Beberapa SMA Yogyakarta: Suatu Studi Perbandingan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Mboi, N. 1994. *Community Participation and Public Health in Indonesia: The Challenge of Women and AIDS. Working Paper*. Presented at Mary Johnston Memorial Lecture, Melbourne, 25 Juli 1994.
- McClelland, D.C. 1985. *Human Motivation*. Illinois: Scott, Foresman and Company.
- Murray, A.J. 1991. *No Money, No Honey: A Study of Street Traders and Prostitutes in Jakarta*. Singapore: Oxford University Press.
- Tempo. 1993. *Alasan Masuk Lorong Remang*. 28 Agustus 1993.
- Tim Universitas Gadjah Mada. 1992. *Studi Peningkatan Peran Wanita di Bidang Pariwisata dan Permasalahannya di Pulau Batam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata, Bagian Proyek Studi Kerjasama Teknik Luar Negeri Pariwisata.
- Truong, T. 1990. *Sex, Money and Morality: Prostitution and Tourism in South East Asia*. London: Zed Books, Ltd.
- Yuniatmi, R.Y. 1986. *Jajaran Ranjang Sebagai Sumber Penghidupan: Studi Kasus Mengenai Kehidupan Sosial Ekonomi Germo di Lokalisasi Baben*. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.

Biodata:

Koentjoro adalah staf pengajar pada Fakultas Psikologi UGM sejak tahun 1982. Lulus S1 dari Fakultas Psikologi UGM tahun 1981. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi untuk doktor di bidang Social Work, pada Faculty of Social Sciences, La Trobe University, Victoria, Australia. Minat utama adalah psikologi sosial, dan khususnya masalah prostitusi.